

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi kedalam 20 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk \pm 555.146 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per km². Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layana telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet). Jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³, dan layana Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal).

4.2 Geografis Kabupaten Kampar

4.2.1 Keadaan Alam

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang

Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- d Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

4.2.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum 320C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2006, yang terbanyak adalah disekitar Salo, Bangkinang, dan Bangkinang Seberang sedang yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu

4.3 Profil Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Koto Kampar Hulu terdapat di hulu sungai kampar. Berikut ini adalah keterangan mengenai Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berjarak 85 km dari kota Bangkinang. Secara geografis wilayah ini terletak pada 00 17' – 07.04'' LS dan 1000 - 09'58.0'' BT dengan ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan sungai kampar, memanjang dari arah utara ke selatan dengan panjang 16,4 km dan lebar 7 km, dengan batas-batas sebelah utara Kecamatan Kapur IX (Sumbar), sebelah selatan Kecamatan Aliantan (Rohul), sebelah barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan sebelah timur kecamatan Kabun (Rohul). Kawasan sekitar kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 desa.

4.4 Profil Desa Tabing

Desa Tabing merupakan sebuah desa berkembang yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dengan tingkatan suhu harian rata-rata 24-33°C. dengan tingkatan suhu pada malam hari berkisar antara 17-20°C.

Adapun orbitasi desa Tabing adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Desa Tabing dari Ibu Kota Kecamatan 2 KM.
- b. Jarak Desa Tabing dari Ibu Kota Kabupaten 76 KM.
- c. Jarak Desa Tabing dari Ibu Kota Propinsi 166 KM.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Tabing adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pongkai Tabing.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Malelo.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kenagarian Muara Peti, Sumatera Barat.

luas wilayah Desa Tabing 10.000 Ha, dan jumlah penduduk tahun 2013 adalah 1754 jiwa, terdiri dari 985 penduduk laki-laki dan 769 penduduk perempuan dan sebanyak 554 kepala keluarga. Keberadaan penduduk ini memberikan data yang harus dilakukan pembenahan dan pemberdayaan terhadap jumlah masyarakat yang tinggal dipedesaan.

Komposisi Penduduk menurut umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Penduduk desa Tabing kriteria anak-anak dengan usia 0-12 tahun sebanyak 313 jiwa, usia remaja 13-19 tahun sebanyak 289 jiwa, usia produktif untuk melakukan usaha yaitu rentang usia 20-38 tahun sebanyak 678 jiwa, dan usia dewasa sebagai pembina masyarakat untuk melakukan perihal pengembangan diri pada usia 39 tahun keatas sebanyak 474 jiwa. Dengan demikian maka jika dilihat dari klasifikasi umur penduduk Desa Tabing maka, usia produktif tergolong dalam jumlah terbanyak, sehingga memerlukan pengembangan dalam meningkatkan kemampuan untuk menyongsong hari tua.

Penduduk Desa Tabing masih banyak yang tidak menamatkan pendidikan SD dengan jumlah 594 jiwa, penduduk yang tamat pendidikan SD sebanyak 201 jiwa, tamatan SLTP sebanyak 495 jiwa, tamatan SLTA sebanyak 495 jiwa dan tamatan Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 57 jiwa.

Sektor mata pencarian di desa Tabing adalah Petani 597 orang, Tukang 28 orang, Buruh 48 orang, Pedagang 27 orang, PNS 19 orang, lain-lain 497 dan totalnya adalah 1216.

Penduduk Desa Tabing merupakan penduduk asli dari turun temurun nenek moyang mereka, sehingga dengan demikian masih menganut agama turunan dari nenek moyang mereka, yaitu agama Islam. Hal ini terjadi akibat tidak adanya pendatang dari penduduk lain dari berbagai budaya dan agama yang berbeda.

Prasana fisik Desa dalam perkembangannya mulai dari berdirinya, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Jenis Prasarana Fisik Bangunan Desa Tabing

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Pasar Rakyat	1
3	Balai adat	1
4	Puskesmas	1
5	Mesjid	2
6	Mushallah	4
7	Gedung TK	1
8	Gedung SD	1
9	Gedung MTs	1
Total		13

Sumber : Kantor Kepala Desa Tabing, 2013

Selanjutnya prasarana perhubungan Desa Tabing dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.4 Jenis Prasarana Perhubungan Desa Tabing

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Jalan aspal	1
2	Jalan Batu	1
3	Kalam Tanah	1
4	Jembatan	1
Total		4

Sumber : Kantor Kepala Desa Tabing, 2013

4.5 Gambaran Umum PNPM Mandiri

4.5.1 Sejarah PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri.

Pemerintah mendorong program nasional ini melalui pengembangan sistem dan disain program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan dalam wadah PNPM Mandiri yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan.

PNPM Mandiri ini adalah sebagai wadah program yang disempurnakan khususnya pada (Tim Koordinasi PNPM Mandiri):

- a. Unifikasi system dan mekanisme,
- b. Perbaikan disain program,
- c. Penetapan target secara nasional,
- d. Perbaikan dalam mekanisme penyaluran pendanaan,

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PKK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi sekelompok rakyat isiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

4.5.2 Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungan, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif,

serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PKK).

4.5.3 Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dipedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*proo-poor budgeting*).
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Selain itu prioritas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah berupa:

- a. Masih besarnya jumlah penduduk miskin.
- b. Masih tingginya angka pengangguran terbuka.
- c. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi bagi masyarakat miskin.
- d. Masih terdapatnya kawasan masyarakat kumuh yang luas dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan.

Pada bulan September 2006, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 – 2009 dan juga pada pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), melalui antara lain:

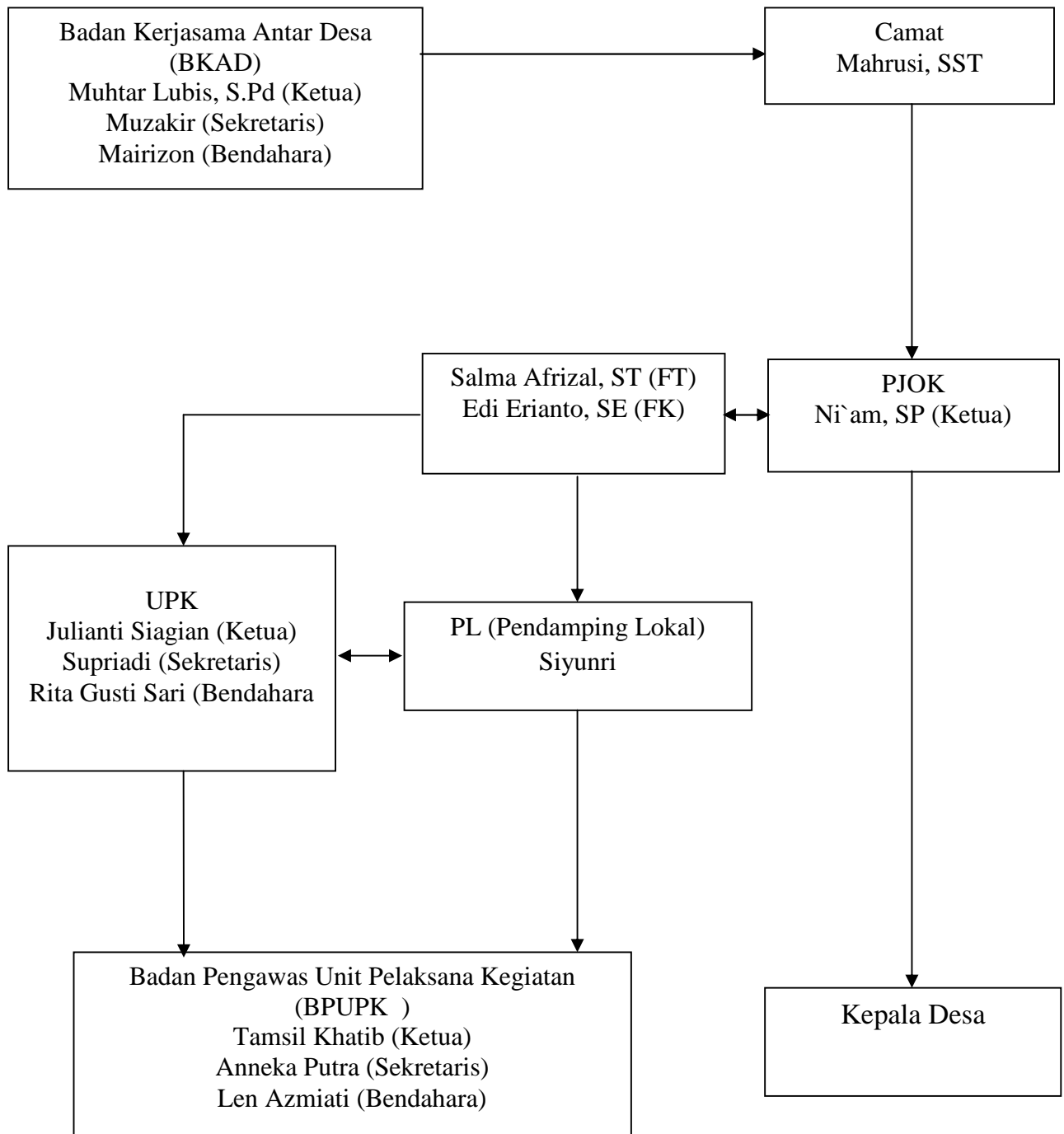
- a. Meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan.

- e. Mengkonsolidasikan dan memperluas program-program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.
- f. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Pengembangan energi alternatif untuk membantu masyarakat miskin.
- h. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi masyarakat miskin.
- i. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dasar, kesehatan dan pendidikan.
- j. Menyempurnakan sistem bantuan dan jaminan sosial untuk rumah tangga miskin.

4.5.4 Struktur organisasi PNPM Mandiri

Struktur organisasi PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terlibat dalam pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik dipusat maupun daerah, struktur organisasi PNPM Mandiri dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Koto



Sumber : PNPM Mandiri Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2013

4.5.5 Uraian Tugas pokok Dan Fungsi PNPM kecamatan Koto Kampar Hulu

Tugas pokok pelaku organisasi PNPM Mandiri di Kecamatan Koto Kampar dengan rincian peran pelaku-pelaku PNPM-MP Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

PJOK adalah seorang kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

c. Tim Verifikasi (TV)

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, dibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa

peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

d. Unit Pengelola Kegiatan

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasionalpelaksana kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mndapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.

e. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UP. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

f. Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

g. Pendamping Lokal (PL)

Pendamping lokal adalah pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Disetiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

h. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan satu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TPK, dan lain-lainnya) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statute dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan. Dalam kaitannya dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha

kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.